

**PERAN *CORPORATE GOVERNANCE*  
DALAM PENGUNGKAPAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN:  
STUDI EMPIRIS BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**Djoko Suhardjanto**

**Wahyu B. Utama**

**Supriyono**

Universitas Negeri Sebelas Maret

***ABSTRACT***

*The purposes of this study are to examine the effect of corporate governance to social and environmental disclosure of Indonesian State-Owned Enterprises (SOEs) and to examine the degree of social and environmental disclosure between listed public entities and non-listed public entities. Corporate governance are identified as the the proportion of independent commissioners, the number of board meetings, experience of president commissioner and the proportion of independent audit committee members. This study also uses profitability as control variable. The level of social and environmental disclosure is measured based on identified items of Sustainability Reporting Guidelines from Global Reporting Initiative (2006). Under purposive sampling, secondary data of 56 annual reports year 2007-2009 of SOEs in Indonesia. The average level of social and environmental disclosure is at 42,11% and there is significant gap of the level of social and environmental disclosure between listed public entities and non-listed public entities. In accordance to the purpose of the study, the result of multiple regression shows that corporate governance affects the level of social and environmental disclosure through the variable proportion of independent commissioners. Other variables, the number of board meetings, the proportion of independent audit committee members and the experience of president commissioner are not good predictors for level of social and environmental disclosure.*

*Keywords : corporate governance, social and environmental disclosure, Indonesian State-Owned Enterprises, Global Reporting Initiative (GRI)*

**PENDAHULUAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *corporate governance* dalam praktik pengungkapan sosial dan lingkungan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang *listing* dan *non-listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Corporate governance* direpresentasikan dengan proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, pengalaman komisaris utama, dan proporsi

komite audit independen. Penelitian ini juga menganalisa perbedaan tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan pada BUMN yang *listing* dan *non-listing* di BEI.

Skandal perusahaan besar seperti Ahold, Worldcom, Enron, dan Parmalat memicu pengembangan konsep tentang *corporate governance* sebagai isu yang penting dalam menjalankan bisnis perusahaan (Kolk dan Pinkse, 2008). Perkembangan yang

terus-menerus atas *corporate governance* tersebut mempengaruhi pula terhadap konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Andayani, Atmini, dan Mwangi (2008) menyatakan bahwa konsep *corporate governance* dan tanggung jawab sosial dapat dilakukan bersama-sama.

Di Indonesia, adanya catatan buruk tentang BUMN antara lain disebabkan oleh penerapan kaidah tata kelola perusahaan yang tidak baik (Bappenas, 2008). Berita tentang 50 BUMN yang berperingkat buruk dalam PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, menunjukkan bahwa kinerja lingkungan BUMN masih rendah (Kompas, 2009). Buruknya kondisi BUMN mengindikasikan prinsip tata kelola perusahaan belum diimplementasikan dengan baik. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, salah satu sasaran dalam peningkatan pengelolaan BUMN adalah dengan meningkatkan pelaksanaan tata kelola yang benar (Cahyaningrum, 2009).

Pengungkapan sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan menjadi penting karena dapat mengurangi asimetri informasi yang menyebabkan kerugian bagi *stakeholder*. Kualitas laporan perusahaan dan pengungkapannya menjadi penting dan berarti bagi manajemen sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kemampuan *corporate*

*governance* dan kinerja perusahaan kepada *stakeholder* (Healy dan Palepu, 2001).

Schuster dan O'Connel (2006) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis pengungkapan, yang pertama adalah pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah pengungkapan informasi yang diharuskan untuk disampaikan oleh peraturan yang berlaku. Kedua, pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan yang melebihi dari apa yang diwajibkan oleh standar, seperti pengungkapan sosial dan lingkungan.

Said, Zainuddin, dan Haron (2009) menguji hubungan antara karakteristik *corporate governance* terhadap tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan publik di Malaysia. Hasil penelitian menemukan bahwa keberadaan komite audit berhubungan positif dengan pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. Andayani, Atmini, dan Mwangi (2008) meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan publik di Indonesia dan menghasilkan bukti bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. Penelitian terkait pengungkapan sosial dan lingkungan pada BUMN dan perusahaan publik dilakukan oleh Fauzi, Rahman, Hussain, dan Priyanto (2008). Penelitian tersebut menyatakan bahwa

tidak ada hubungan antara kinerja sosial dan lingkungan dengan kinerja keuangan perusahaan. Di Indonesia, penelitian terkait pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan pada BUMN belum pernah dilakukan.

Penelitian ini penting dilakukan karena BUMN mempunyai tujuan untuk turut aktif dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat dan lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial. Alasan kedua adalah karena BUMN memiliki bidang usaha yang luas, menyerap tenaga kerja yang banyak, dan memiliki aset yang besar sehingga keberhasilan pengelolaan BUMN berarti bagi negara. Penelitian ini juga melihat bahwa pengembangan tata kelola BUMN belum menyentuh kepada substansi *governance* dalam struktur dan mekanismenya, sehingga permasalahan BUMN belum terselesaikan, misalnya tidak efisien, berdaya saing rendah, dan belum *professional* (Syakhroza, 2005). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan antara BUMN yang *listing* maupun yang *non-listing* di BEI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Peran Corporate Governance dalam Pengungkapan Sosial dan Lingkungan: Studi Empiris Badan Usaha Milik Negara”**.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Pengungkapan Sosial dan Lingkungan

Mathews (1997:483) mendefinisikan pengungkapan sosial dan lingkungan sebagai berikut:

*“Voluntary disclosures of information, both qualitative and quantitative made by organizations to inform or influence a range of audiences. The quantitative disclosures may be in financial or non-financial terms.”*

Berdasarkan definisi tersebut, pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan pengungkapan informasi sukarela, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dibuat oleh organisasi untuk menginformasikan aktivitasnya (Nurdin dan Cahyandito, 2006). Global Reporting Initiative atau GRI (2006) juga menyebutkan bahwa sebaiknya laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak hanya mengungkapkan praktik sosial dan lingkungan secara kualitatif tetapi juga mengkuantifikasi secara keseluruhan atas dampak sosial dan lingkungan atas kegiatan perusahaan. GRI (2006) merekomendasikan beberapa aspek<sup>1</sup> lingkungan dan sosial yang selayaknya diungkapkan dalam laporan tahunan, yaitu sembilan aspek lingkungan dan

---

1 Aspek lingkungan (material, energi, air, keanekaragamanhayati, emisi, produk, *compliance*, dan transportasi); Aspek sosial: tanggung jawab produk, praktik tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, hak asasi manusia, dan masyarakat.

22 aspek sosial. Aspek tersebut digunakan dalam mengukur tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan.

### ***Corporate Governance***

FCGI (2001) menyatakan bahwa *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang saham intern dan eksteren lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. *Corporate governance* yang dijalankan dengan benar dapat berpengaruh terhadap pelaporan perusahaan (Eng dan Mak, 2003), termasuk pengungkapan sosial dan lingkungan sehingga diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan *stakeholders*. Ettredge, Johnstone, Stone, dan Wang (2010) menemukan bukti bahwa kualitas *corporate governance* memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pengungkapan.

Definisi dewan komisaris menurut UUPT No. 40 tahun 2007 adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Peran penting dalam melaksanakan *corporate governance* berada pada dewan komisaris yang berfungsi sebagai pengawas aktifitas dan kinerja serta sebagai penasihat direksi dalam memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance* yang

baik (KNKG, 2006). Ettredge, Johnstone, Stone, dan Wang (2010) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan. Menurut Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002, dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Dalam keadaan perusahaan yang membutuhkan kontrol yang ketat, dewan komisaris seharusnya meningkatkan frekuensi rapatnya (Khanchel, 2007). Peningkatan frekuensi rapat dewan komisaris dapat membenahi kinerja perusahaan yang buruk dengan lebih cepat (Vafeas, 1999). Berdasarkan hal tersebut, semakin banyak rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris, semakin mendorong perbaikan kualitas pengungkapan perusahaan.

Variabel pengalaman komisaris utama dapat digunakan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap karena dengan pandangan dan pengalaman yang luas, seperti memiliki pemahaman di bidang sosial, budaya, dan lingkungan, komisaris utama dapat mengembangkan pengungkapan tanggung jawab sosial di perusahaannya (Utama, 2007). Diharapkan dengan pengalaman sosial, budaya, dan lingkungan komisaris utama dapat meningkatkan kualitas pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan.

Menurut Kepmen BUMN No. Kep-103/MBU/2002, komite audit adalah komite

yang bekerja secara kolektif dengan dewan komisaris dan berfungsi membantu komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit bertugas untuk memastikan bahwa terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN. Anggota independen komite audit tidak terafiliasi dengan perusahaan (FCGI, 2001) sehingga kemandiriannya dalam membantu dewan komisaris dapat dipercaya. Keberadaan anggota komite audit yang independen, mempunyai pengaruh yang sama seperti komisaris independen dalam mendorong peningkatan kualitas pengungkapan (Cheng dan Courtenay, 2006). Keberadaan anggota independen dapat mempengaruhi secara positif terhadap kualitas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan (Ho dan Wong, 2001).

### **Pengembangan Hipotesis**

1. Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan

Keberadaan komisaris independen dalam dewan komisaris meningkatkan kontrol terhadap aktivitas manajemen. Komisaris yang berasal dari luar perusahaan dapat meningkatkan keefektifan dewan komisaris dalam mengawasi pengelolaan perusahaan oleh manajemen (Fama dan Jansen, 1983).

Penelitian Ho dan Wong (2001), Xiao dan Yuan (2007), dan Andayani,

Atmini, dan Mwangi (2008) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan perusahaan, termasuk pengungkapan sosial dan lingkungan. Diharapkan semakin tinggi komposisi komisaris independen, semakin meningkatkan pengungkapan sosial dan lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikembangkan hipotesis:

H<sub>1</sub>: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan

2. Pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris biasanya mengadakan pertemuan rutin melalui rapat dewan komisaris. Menurut Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002, dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Andersson dan Daoud (2005) menemukan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate governance*. Xie, Davidson III, dan Dalt (2001) berpendapat bahwa semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, semakin efektif fungsi pengawasan terhadap manajemen.

Vafeas (2003); Brick dan Chidambaran (2007) menyatakan bahwa semakin banyak

frekuensi rapat yang diselenggarakan dewan komisaris, semakin meningkatkan kinerja perusahaan. Diharapkan dengan semakin tingginya jumlah rapat dewan komisaris, semakin meningkatkan pengungkapan sosial dan lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikembangkan hipotesis:

H<sub>2</sub>: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan

### 3. Pengaruh pengalaman komisaris utama

Martoyo (2002) menyatakan bahwa pengalaman adalah faktor yang dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja selain kemampuan intelegensi yang menjadi dasar pertimbangan. Seorang komisaris yang pernah memiliki pengalaman kerja cenderung memiliki kinerja yang lebih baik (Chemmanur dan Paeglis, 2004).

Pengalaman komisaris utama dapat memengaruhi keputusan dan masukan yang diberikan kepada dewan direksi, walaupun tidak ada keharusan bagi komisaris utama untuk memiliki pengalaman kerja di bidang sosial, lingkungan, dan budaya, namun lebih baik jika komisaris utama mempunyai pengalaman sosial, budaya, dan lingkungan. Chemmanur dan Paeglis (2004); Reeb dan Zhao (2009); Chemmanur, Paeglis, dan Simonyan (2009); Artha (2010) menyatakan bahwa pengalaman dewan komisaris merupakan

faktor yang menentukan dalam peningkatan nilai perusahaan dan kualitas pengungkapan perusahaan. Diharapkan komisaris yang mempunyai pengalaman sosial, budaya, dan lingkungan, memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikembangkan hipotesis:

H<sub>3</sub>: Pengalaman komisaris utama berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan

### 4. Pengaruh proporsi anggota independen komite audit terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan

Komite audit menjadi perhatian pemegang saham karena perannya dalam memonitor praktik pelaporan keuangan (Karamanou dan Vafeas, 2005). Nasir dan Abdullah (2005) menyatakan bahwa keberadaan komite audit yang semakin besar membantu menjamin kualitas pengungkapan dan sistem pengendalian internal dapat berjalan dengan baik.

Ho dan Wong (2001); Nasution dan Setiawan (2007); Li, Pike, dan Haniffa (2008) menyatakan bahwa komite audit independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan, termasuk pengungkapan sosial dan lingkungan. Diharapkan semakin tinggi proporsi anggota komite audit independen, semakin tinggi pengungkapan

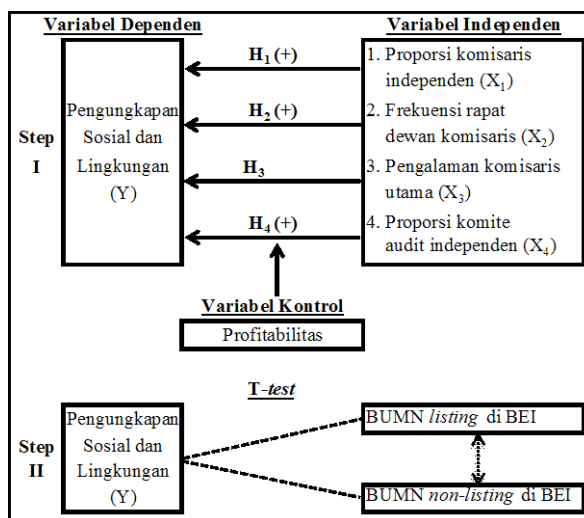
informasi praktik sosial dan lingkungan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikembangkan hipotesis:

H<sub>4</sub>: Proporsi anggota independen komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat

pengungkapan sosial dan lingkungan

Di bawah ini adalah gambar yang menjelaskan hubungan antar masing-masing variabel:

**Gambar 1 Skema konsep penelitian**



Selain menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, penelitian ini juga menyertakan profitabilitas sebagai variabel kontrol.

## METODA PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis (*hypothesis testing*). Menurut Sekaran (2006), pengujian hipotesis harus dapat menjelaskan sifat dari hubungan tertentu, memahami perbedaan antar kelompok atau independensi dua variabel atau lebih.

## Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BUMN yang *listing* dan *non-listing* di BEI pada tahun 2007-2009. Tahun tersebut dipilih karena *Global Reporting Initiative* (GRI) pada tahun 2006 mengeluarkan standar terbaru tentang pelaporan praktik dan pelaporan sosial dan lingkungan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, di mana perusahaan yang menjadi sampel adalah

perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan di *website* BUMN dan/atau di *website* BEI pada tahun 2007-2009. Jumlah sampel yang dapat diambil adalah 56 BUMN.

### Data dan Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan BUMN yang *listing* dan *non-listing* di BEI pada tahun 2007-2009. Data sekunder yang dikumpulkan diperoleh dari jurnal, situs BUMN, situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan dari situs perusahaan sampel.

### Definisi Operasional dan Pengukuran

#### Variabel

Penelitian ini terdiri dari variabel independen, dependen dan *control* dengan definisi dan pengukuran sebagai berikut:

#### 1. Variabel Independen

##### a. Proporsi komisaris independen

Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Eng dan Mak (2005), Haniffa dan Cooke (2005), dan Suhardjanto dan Afni (2009), yaitu persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.

##### b. Jumlah rapat dewan komisaris

Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Vafeas (2003); Brick dan Chidambaran (2007); dan Ettredge, Johnstone, Stone dan Wang (2010) yaitu jumlah rapat yang dilakukan dewan komisaris dalam waktu satu tahun.

##### c. Pengalaman komisaris utama

Pengalaman direpresentasikan dengan penghargaan, organisasi, atau jabatan pekerjaan yang berhubungan dengan sosial, budaya, dan lingkungan (Reeb dan Zhao, 2009). Indikator yang digunakan sesuai dengan Chemmanur dan Paeglis (2004); Reeb dan Zhao (2009); Artha (2010) yaitu komisaris utama yang memiliki pengalaman sosial, budaya, dan lingkungan diberi kode 1, dan selain berlatar pengalaman sosial, budaya, dan lingkungan diberi kode 0.

##### d. Proporsi komite audit independen

Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Nasution dan Setiawan (2007) ; Li, Pike, dan Haniffa (2008) ; Suhardjanto dan Afni (2010); dan Suhardjanto (2010), yaitu persentase anggota komite audit yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran komite audit perusahaan.

#### 2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan sosial dan lingkungan. Pengukuran pengungkapan sosial dan lingkungan menggunakan *sustainability reporting* dari *Guidelines Reporting Initiative* (GRI) tahun 2006.

Pengungkapan sosial dan lingkungan di dalam penelitian ini menggunakan item yang terdapat pada indikator kinerja lingkungan dan sosial yang terdapat di dalam GRI tahun 2006. Terdapat sembilan



aspek pengungkapan lingkungan dan 22 aspek pengungkapan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan *disclosure scoring* atau yang disebut *dichotomous*, yaitu jika sebuah perusahaan mengungkapkan item yang terdapat dalam daftar, diberi nilai 1, dan 0 jika tidak mengungkapkan (Cooke, 1989). Skor total pengungkapan sesuai dengan yang digunakan oleh Hossain, Islam, dan Andrew (2006).

$$STP = \sum_{i=1}^n d_i$$

Dimana:

STP = skor total pengungkapan untuk perusahaan *i*

$d_i$  = 1 jika item diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan

*n* = jumlah item pengungkapan yang diungkapkan oleh perusahaan

Indeks pengungkapan sosial dan lingkungan setiap perusahaan diukur dengan rumus:

$$SEDS_i = \frac{STP_i}{SPM}$$

Skor pengungkapan maksimum (SPM) adalah skor pengungkapan total yang diharapkan bisa dicapai oleh sebuah perusahaan. SPM untuk pengungkapan sosial dan lingkungan adalah 31. *Social and Environmental Disclosure Score* (SEDS) adalah skor pengungkapan sosial dan lingkungan

untuk perusahaan *i*, yang merupakan ukuran tingkat keluasan pengungkapan sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. *Social and Environmental Disclosure Score* (SEDS) maksimum adalah 100%.

### 3. Variabel Kontrol

#### Profitabilitas

Indikator yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan penelitian Haniffa dan Cooke (2005) yang dihitung dengan membandingkan antara pendapatan setelah pajak dengan total ekuitas.

$$ROE = \frac{\text{Pendapatan setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

#### Teknik Analisis Data

$$SEDS = \beta_0 + \beta_1 \text{PROKI} + \beta_2 \text{RPTDK} + \beta_3 \text{EXPKU} + \beta_4 \text{PROKAI} + \beta_5 \text{PROFIT} + \varepsilon$$

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS *release* 16. Sebagai persyaratan pengujian regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien (Gujarati, 2003). Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Persamaan regresi berganda untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

### Keterangan Persamaan Regresi Berganda

Simbol	Keterangan
SEDS	<i>Social and Environmental Disclosure Score</i>
PROKI	Proporsi Komisaris Independen
RPTDK	Jumlah Rapat Dewan Komisaris
EXPKU	Pengalaman Komisaris Utama
PROKAI	Proporsi Anggota Independen Komite Audit
PROFIT	Profitabilitas
$\beta$	Koefisien Regresi
$\varepsilon$	Tingkat kesalahan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskriptif Data

Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari tahun 2007 hingga 2009, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian**

Tahun	Populasi	Sampel Digunakan
2007	115	18
2008	115	19
2009	114	19
Total	344	56

Populasi dalam penelitian ini adalah BUMN selama tahun 2007-2009 yang berjumlah 344 perusahaan. Pada Tabel 1 dijelaskan bahwa pada tahun 2007 terdapat 18 BUMN, pada tahun 2008 terdapat 19 BUMN dan 19 BUMN pada tahun 2009.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 56 perusahaan.

**Tabel 2 Statistik Deskriptif *Social and Environmental Disclosure***

	N	Min (%)	Max (%)	Mean (%)	Std. Deviation (%)
SEDS	56	9,700	93,500	42,109	15,941

Statistik deskriptif pada Tabel 2 menunjukkan bahwa rerata tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan pada 56 perusahaan sebesar 42,11% atau rerata

baru dapat memenuhi 13 aspek sosial dan lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan pada *annual report* perusahaan BUMN masih

belum memenuhi separuh dari skor total pengungkapan sosial dan lingkungan.

Struktur *governance* yang direpresentasikan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dewan komisaris, dan dewan direksi yang hanya mempunyai tujuan untuk memaksimalkan laba, menyebabkan kegiatan sosial dan lingkungan beserta pengungkapannya menjadi sulit berkembang, (Utama, 2007). Kurangnya pengungkapan sosial dan lingkungan oleh BUMN dapat dimaklumi dengan masih terjadinya kasus korupsi di dalam BUMN, seperti yang diberitakan bahwa PT Pupuk Sriwidjaja terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan *mark up* pengadaan barang ([www.situshukum.com](http://www.situshukum.com), 2010). Hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan tidak mengungkapkan aspek korupsi dalam indikator masyarakat (GRI, 2006). Kasus lain yang terjadi pada BUMN adalah kasus perampasan tanah garapan petani yang dilakukan PT Perkebunan Nasional VIII (Peduli Rakyat *Online*, 2010). Berdasarkan kasus yang terjadi, BUMN dipersepsikan oleh publik sebagai perusahaan yang tidak menghormati hak penduduk asli dan penuh dengan korupsi dan kolusi (Cahyaningrum, 2009). Rerata tingkat pengungkapan sosial

dan lingkungan sebesar 42,11% menunjukkan prinsip *corporate governance* belum diterapkan dengan baik.

Nilai minimum pengungkapan sosial dan lingkungan pada penelitian ini adalah 9,70% yaitu PT Perusahaan Pengelola Aset (2007) yang hanya mengungkapkan tiga (3) aspek sosial dan lingkungan saja, yaitu aspek *biodiversity*, *overall*, dan komunitas. Nilai maksimum pengungkapan sosial dan lingkungan pada penelitian ini adalah sebesar 93,50% yaitu oleh PT Telkom Indonesia Tbk (2009). Hal ini dikarenakan PT Telkom Indonesia Tbk mengikuti *Sustainability Reporting Guidelines* dari GRI dengan baik dalam mengungkapkan praktik sosial dan lingkungan.

Statistik deskriptif variabel independen dijelaskan pada Tabel 3 di bawah ini. Rerata proporsi komisaris independen sebesar 29,08%; rerata frekuensi rapat dewan komisaris sebanyak 17 kali; rerata komposisi komite audit independen sebesar 82,36%; dan rerata profitabilitas sebesar 21,02%. Tabel 4 memperlihatkan bahwa pada tahun 2007, jumlah komisaris utama yang berpengalaman dalam bidang sosial, budaya, dan lingkungan adalah empat orang, kemudian lima orang (2008), dan empat orang (2009).

**Tabel 3 Statistik Deskriptif Variabel Independen**

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
PROKI (%)	56	0,000	71,400	29,080	22,843
RPTDK (kali/tahun)	56	3,000	51,000	17,020	9,044
PROKAI (%)	56	0,333	1,000	82,361	17,813
PROFIT (%)	56	4,000	58,600	21,016	13,227
Valid N (listwise)	56				

**Tabel 4 Statistik Deskriptif Pengalaman Komisaris Utama**

Tahun	Sosial, Budaya, dan Lingkungan	Non-Sosial, Budaya, dan Lingkungan
2007	4	14
2008	5	14
2009	4	15
Total	13	43

**Pengujian Hipotesis dan Pembahasan**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis

regresi berganda dengan metode *enter*. Hasil regresi berganda setelah pengujian asumsi klasik dapat dilihat sebagai berikut:

**Analisis Regresi Berganda****Tabel 5 Hasil Regresi Berganda**

Variabel	Koefisien	t	p-value
(constant)	0,141	1,323	0,192
<b>PROKI</b>	<b>0,231</b>	<b>2,100</b>	<b>0,041*</b>
RPTDK	0,000	-0,090	0,929
EXPKU	-0,029	-0,643	0,523
PROKAI	0,149	1,083	0,284
<b>PROFIT</b>	<b>0,475</b>	<b>3,521</b>	<b>0,001*</b>
<i>R Square</i>	0,376		
<i>Adjusted R Square</i>	0,313		
F	6,022		
Sig	0,000		

\*Secara statistik signifikan pada tingkat 5%

Dari Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa nilai *R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,376 dan *Adjusted R Square* (*Adjusted R<sup>2</sup>*) sebesar 0,313. Berdasarkan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 31,30% variabel dependen dapat dijelaskan

oleh variabel independen dan variabel kontrol dan sisanya sebanyak 68,70% dijelaskan oleh faktor lain.

Nilai F hitung sebesar 6,022 dengan probabilitas 0,000 ( $p\text{-value} < 5\%$ ). Nilai F lebih besar dari 4,000 dan probabilitas jauh

lebih kecil dari 5%, sehingga model regresi ini menunjukkan *good overall model fit* sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengungkapan sosial dan lingkungan atau dapat dikatakan bahwa proporsi komisaris independen, pengalaman komisaris utama, jumlah rapat dewan komisaris, komite audit independen, dan profitabilitas perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan (Ghozali, 2006).

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen (variabel independen) dan profitabilitas (variabel kontrol) berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan, sedangkan jumlah rapat dewan komisaris, proporsi komite audit independen, dan pengalaman komisaris utama tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.

Proporsi komisaris independen berpengaruh positif signifikan ( $p$ -value sebesar 4,10%) terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Hal ini mengindikasikan bahwa peran dan tanggung jawab dijalankan dengan baik oleh anggota komisaris independen.

Penelitian Webb (2004) menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat tanggung jawab sosial yang tinggi mempunyai komisaris independen yang lebih banyak daripada perusahaan yang tingkat tanggung jawab sosialnya rendah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

komisaris independen mempunyai dorongan untuk melindungi kepentingan pemegang saham secara baik (Said, Zainuddin, dan Haron, 2009). Said, Zainuddin, dan Haron (2009) menyatakan bahwa bahwa komisaris independen memainkan sebuah peran yang penting untuk meningkatkan *image* baik perusahaan dan bertugas memonitoring untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan oleh manajemen dengan baik. Di sisi lain, konsekuensi adanya praktik sosial dan lingkungan tidak dapat membuat *image* perusahaan menjadi buruk.

Koefisien positif yang dimiliki proporsi komisaris independen menunjukkan hubungan positif antara proporsi komisaris independen terhadap tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Xiao, Yang, dan Chow (2004); Xiao dan Yuan (2007); Suhardjanto dan Choiriyah (2010) yang menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan yang dilakukan perusahaan.

Hipotesis kedua adalah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Rapat dewan komisaris memiliki  $p$ -value sebesar 92,90% jauh di atas 5,00%. Nilai ini menunjukkan bahwa rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.

Tingginya rerata jumlah pertemuan dewan komisaris di perusahaan BUMN

sebesar 17 kali dalam setahun dimungkinkan hanya untuk mematuhi peraturan yaitu minimal satu kali dalam sebulan. Tingginya frekuensi dewan komisaris melakukan rapat tidak menjadikan fungsi pengawasan dewan komisaris perusahaan semakin baik dan efektif, sehingga tidak menjamin perusahaan memiliki pengungkapan sosial dan lingkungan yang baik. Kondisi ini seperti yang terjadi pada PT Bank BTN (2007), dimana dalam setahun frekuensi pertemuan komisaris sebanyak 35 kali, tetapi memiliki pengungkapan sosial lingkungan yang kurang baik dimana dalam persentase pengungkapan hanya 25,81% dan di bawah rerata pengungkapan perusahaan BUMN sebesar 42,11%. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Vafeas (2003); Brick dan Chidambaran (2007); Suhardjanto dan Permatasari (2010) yang menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan perusahaan.

Variabel ketiga yaitu pengalaman komisaris utama, menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Pengalaman komisaris utama mempunyai nilai  $p$ -value sebesar 52,30% lebih besar dari 5,00% menunjukkan bahwa pengalaman komisaris utama tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan.

Komisaris utama harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Kompetensi diperoleh melalui

pendidikan dan pengalaman (Purwati, 2006). Tidak berpengaruhnya pengalaman komisaris utama terhadap tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan dimungkinkan karena komisaris utama tidak memiliki kompetensi yang cukup. Hal tersebut dibuktikan dalam penelitian ini, dimana 13 komisaris utama yang memiliki pengalaman di bidang sosial, lingkungan, dan budaya tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pengalaman yang dimiliki. Komisaris utama tersebut tidak memiliki pendidikan yang mengajarkan tentang ilmu sosial, lingkungan, dan budaya, seperti mata ajaran humaniora yang relevan dengan praktik dan pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan (Utama, 2007). Hasil ini sesuai dengan penelitian Chemmanur dan Paeglis (2004) dan Artha (2010).

Variabel keempat, proporsi komite audit independen merupakan variabel independen terakhir dalam penelitian ini. Proporsi komite audit independen memiliki  $p$ -value 28,40% jauh di atas 5,00% menunjukkan bahwa variabel proporsi komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dimungkinkan komite audit tidak melakukan *review* laporan tahunan atau laporan perusahaan yang terkait dengan pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. Sommer (1991) menyatakan bahwa banyak komite audit yang hanya

sekedar melakukan tugas rutin, seperti *review* laporan dan seleksi auditor eksternal, dan tidak mempertanyakan secara kritis dan menganalisis secara mendalam kondisi pengendalian dan pelaksanaan tanggungjawab oleh manajemen. Penyebabnya diduga karena tidak memiliki kompetensi serta independensi yang memadai dan belum memahami peran pokoknya (Manao, 1997). Hasil ini konsisten dengan penelitian Abdullah dan Nasir (2004); Nasir dan Abdullah (2005); Suhardjanto (2010); Suhardjanto dan Permatasari (2010), karena seharusnya keberadaan komite audit independen mendukung prinsip responsibilitas dalam penerapan *corporate governance*, yang menekan perusahaan untuk memberikan informasi lebih baik terutama keterbukaan dan penyajian yang jujur dalam laporan tahunan (FCGI, 2002).

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel kontrol yang juga turut diujikan yaitu profitabilitas (ROE). Variabel profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. Profitabilitas memiliki  $p\text{-value} = 0,001$  lebih kecil daripada 5,00%.

Di Indonesia, perusahaan dengan profitabilitas yang besar memiliki dorongan untuk berinvestasi pada peningkatan kinerja lingkungan dan sosial sehingga dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan demi menjaga reputasi perusahaan. Sembiring (2003)

mengungkapkan bahwa manajemen yang sadar dan memperhatikan masalah sosial juga mampu mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang.

Pengaruh positif signifikan variabel profitabilitas terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi lebih mampu dalam mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan yang dilakukan. Hal ini mungkin dikarenakan persepsi atau anggapan bahwa aktivitas sosial dan lingkungan bukanlah aktivitas yang merugikan dan tidak bermanfaat bagi keberlangsungan perusahaan. Praktik sosial dan lingkungan dianggap sebagai langkah strategis jangka panjang yang dapat memberikan efek positif bagi perusahaan (Nurkhin, 2009).

Hasil ini konsisten dengan penemuan penelitian sebelumnya seperti Haniffa dan Cooke (2005), Hossain, Islam, dan Andrew (2006), dan Suhardjanto dan Miranti (2009). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin tinggi tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan.

### **T-test**

*T-test* digunakan untuk menguji rata-rata atau pengaruh perlakuan dari suatu percobaan yang menggunakan 1 (satu) faktor, dimana 1 (satu) faktor tersebut mempunyai 2 (dua) level. Dalam penelitian ini, *t-test*

dilakukan terhadap variabel pengungkapan sosial dan lingkungan. T-test digunakan untuk menguji apakah pengungkapan sosial dan

lingkungan antara perusahaan BUMN yang *listing* dan *non-listing* di Bursa Efek Indonesia mempunyai perbedaan signifikan.

**Tabel 6 Group Statistik**

	Perusahaan	Mean (%)	Std. Deviasi (%)
SEDS	28 <i>Listing</i>	49,875	16,336
	28 <i>Non-Listing</i>	34,343	11,211

Pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa rerata pengungkapan sosial dan lingkungan untuk BUMN *listing* sebesar 49,88%,

sedangkan untuk kelompok *non-listing* sebesar 34,34%.

**Tabel 7 Independent Sample Test**

		Levene's Test Equality of Variance		T - test for Equality of Means	
		F	Sig.	t	Sig (2tailed)
SEDS	<i>Equal variance assumed</i>	1,720	0,195	4,148	0,000
	<i>Equal variance non assumed</i>			4,148	0,000

Tabel 7 menunjukkan bahwa F hitung *levене test* untuk pengungkapan sosial dan lingkungan sebesar 1,720 dengan probabilitas 19,50% (probabilitas > 5%) dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok populasi tersebut mempunyai *variance* yang sama. Analisis uji beda t (*t-test*) harus menggunakan asumsi *equal variance assumed*. Dari nilai t sebesar 4,148 dan probabilitas 0,000%, hasil ini menunjukkan bahwa rerata pengungkapan sosial dan lingkungan berbeda secara signifikan antara perusahaan BUMN yang terdaftar dan tidak terdaftar di BEI. Hal ini dikarenakan perusahaan *listing* mempunyai lebih banyak pemegang saham dan *stakeholders* daripada

BUMN yang *non-listing*, sehingga dapat menimbulkan banyak tuntutan atas keluasaan pengungkapan informasi dari pemegang saham dan *stakeholders* lain (Jaswadi dan Purnomo, 2006). Hal tersebut sejalan dengan Marwata (2001) yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan publik, semakin banyak pula informasi yang diungkapkan dalam pelaporan perusahaan. Pemilik saham selain dari pihak pemerintah berperan untuk mengawasi manajemen agar bertindak dengan benar, karena kesejahteraan pemegang saham tersebut tergantung kepada kinerja keuangan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan banyaknya kepemilikan publik



dapat memunculkan *agency cost*, yang dapat dikurangi dengan mengungkapkan lebih banyak informasi di dalam pelaporan perusahaan (Xiao dan Yuan, 2007).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Sesuai dengan tujuan penelitian, hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan *corporate governance* mempengaruhi tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan. Variabel independen (*corporate governance*) yang mempengaruhi tingkat tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan adalah proporsi komisaris independen. Semakin besar proporsi komisaris independen yang dimiliki perusahaan, semakin memberikan pengawasan yang lebih optimal terhadap proses pelaksanaan *corporate governance* karena proporsi komisaris independen yang besar dapat memberikan kontrol dan pengawasan terhadap manajemen dalam operasional perusahaan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial. Komisaris independen memberikan tekanan kepada manajemen untuk melaksanakan aktivitas dan pengungkapan sosial dan lingkungan dengan baik (Nurkhin, 2009). Anggota komite audit independen kinerjanya

dapat dipercaya dalam melakukan pengawasan, karena tidak mempunyai afiliasi dengan perusahaan dan komite lainnya (McMullen, 1996). Variabel lainnya yaitu rapat dewan komisaris, proporsi komite audit independen, dan pengalaman komisaris utama tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.

2. Tingkat pengungkapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengungkapkan informasi mengenai praktik sosial dan lingkungan tergolong rendah mengingat dari 56 perusahaan sampel, diketahui bahwa rerata tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan BUMN sebesar 42,11%. Aspek komunitas dari indikator masyarakat menjadi aspek yang paling banyak diungkapkan oleh BUMN. Rendahnya tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan menunjukkan kurang baiknya penerapan prinsip *corporate governance* oleh BUMN di Indonesia.
3. Hasil *t-test* menunjukkan bahwa rerata pengungkapan sosial dan lingkungan berbeda secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan antara BUMN yang terdaftar dengan perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Saran dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dewan komisaris sebagai komponen penting yang mendukung terlaksananya *corporate governance* dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat meningkatkan pengungkapan sosial dan lingkungan di BUMN.
2. Pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN diharapkan secara aktif mendorong BUMN agar meningkatkan kualitas pengungkapan sosial dan lingkungan.
3. Perlu diadakan sosialisasi mengenai pengungkapan sosial dan lingkungan di Badan Usaha Milik Negara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah :

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan item pengungkapan yang lebih spesifik untuk masing-masing aspek sosial dan lingkungan.
2. Untuk penelitian selanjutnya bisa membandingkan tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan di Indonesia dengan negara lain (studi komparatif).

## DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, W., Atmini, S., dan Mwangi, J.K. 2008. *Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance and the Intellectual Property: An External Strategy of the Management to Increase the Company's Value*. National Conference on Management Research. Makassar.
- Artha, Al Ghaniy Dewa. 2010. Analisis Pengaruh Variabel-variabel Reputasi dan Kualitas Manajemen terhadap Kinerja IPO. Skripsi FE Universitas Diponegoro.
- Balou, B., D. L. Heitger, dan C. E. Landes. 2006. *The future of corporate sustainability reporting*. *Journal of Accountancy*, 202 (6): 65-74.
- Brick E, Ivan, dan Chidambaran N.K. 2007. *Board Meetings, Committee Structure, and Firm Performance*. <http://papers.ssrn.com>. 11 November 2010.
- Cahyaningrum, Dian. 2009. Hambatan Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Berbentuk Persero. Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Chemmanur, Thomas J. dan Paeglis, Immants. 2004. *Management Quality, Certification, and Initial Public Offering*. *Jurnal of Financial Economics*, 76 (1): 331-368.
- Chemmanur, Thomas J., Immants Paeglis, dan Karen Simonyan. 2009. *Management Quality, Financial and Investment Policies, and Asymmetric Information*. *Journal of Financial and Quantitatives Analysis*, 44 (5): 1045–1079.

- Cheng, E.C.M. dan Stephen M. Courtenay. *Board Composition, Regulatory Regime and Voluntary disclosure*. Working Paper. Nanyang Technological University.
- Cooke, T.E. 1989. *Disclosure in the Corporate Annual Reports of Swedish Companies*. Accounting and Business Research, 19 (74): 113-124.
- Eng, L.L. dan Mak, Y.T. 2001. *Corporate Governance and Voluntary Disclosure*. Journal Accounting and Public Policy, 22: 325-345.
- Ettredge, Johnstone, Stone dan Wang. 2010. *The effects of company size, corporate governance quality, and bad news on disclosure compliance*. Review of Accounting Studies, Forthcoming.
- Fama, Eugene F. dan Michael C. Jensen. 1983. *Separation of Ownership and Control*. Journal of Law and Economics, 26.
- Fauzi, H., Azhar A. Rahman, Mostaq Hussain, dan Adnan A. Priyanto. 2008. *Corporate Social Performance of Indonesian State-Owned and Private Companies*.
- Febriyanti, Diah. 2010. *Good Corporate Governance sebagai Pilar Implementasi Corporate Social Responsibility*. Garuda Dikti.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2001. *Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*. Jilid II: "Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Melaksanakan Corporate Governance".
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gray, R., Owen D., dan Maunders K. 1987. *Corporate Social Reporting: Accounting and Accountability*, Prentice-Hall, London.
- Haniffa, Ros dan Terry Cooke. 2002. *Culture, Corporate Governance, and Disclosure in Malaysian Corporations*. Abacus, 38: 317-347.
- Haniffa, R. M. dan Cooke, T. E. 2005. *The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting*. Journal of Accounting and Public Policy, 24: 391-430.
- Healy, Paul M. dan Palepu, Krishna G. 2001. *Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature*. Journal of Accounting and Economics, 31: 405-440.
- Ho, Simon S.M. dan Wong, Kar Shun. 2001. *A Study of Relationship Between Corporate Governance Structure and Extent of Voluntary Disclosure*. Journal of International Accounting Auditing and Taxation, 10: 139 – 156.
- Hossain, M.A., Islam M.K.S., dan Andrew J. 2006. *Corporate Social and Environmental Disclosure in Developing Countries: Evidence from Bangladesh*. Faculty of Commerce University of Wollongong.
- Karamanou, Irene dan Nikos Vafeas. 2005. *The Association between Corporate Boards, Audit Committees, and Management Earning Forecasts: An Empirical Analysis*. Journal of Accounting Research, 43 (3).
- Khancel, Imen. 2007. *Corporate governance: measurement and determinant analysis*. Managerial Auditing Journal, 22 (8): 740-760.

- Kolk, Ans dan Pinkse, Jonathan. 2008. *The Integration of Corporate Governance in Corporate Social Responsibility Disclosures*. Corporate Social Responsibility and Environmental Management.
- Kusumawati, DwiNovi. 2006. *Profitability and Corporate Governance Disclosure: an Indonesian Study*. Accounting National Symposium 9th. Padang.
- Li, Hongxia dan Ainian Qi. 2008. *Impact of Corporate Governance on Voluntary Disclosure in Chinese Listed Company*. Corporate Ownership and Control, 5.
- Li, Jing, Richard Pike, dan Roszaini Haniffa. 2008. *Intellectual capital disclosure and corporate governance structure in UK firms*. Accounting and Business Research, 38 (2): 137-159.
- Maksum, Azhar. 2005. Tinjauan atas *Good Corporate Governance* di Indonesia. *USU e-Repository*.
- Martoyo, Susilo. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Erlangga.
- Mathews, M.R. 1997. *Twenty-five years of Social and Environmental Accounting Research*. Accounting, Auditing, & Accountability Journal, 10 (4): 481-531.
- Nasir, N.M. dan Abdullah S.N. 2005. *Voluntary Disclosure and Corporate Governance among Financially Distressed Firms in Malaysia*. Monash University.
- Nasution, Marihot dan Setiawan, Doddy. 2007. Pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba di industri perbankan. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Nuridin, Emilia dan Cahyandito, M.F. 2006. Pengungkapan Tema-tema Sosial dan Lingkungan dalam Laporan Tahunan Perusahaan terhadap Reaksi Investor. Thesis (S2) pada Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran.
- Nurkhin, Ahmad. 2009. *Corporate Governance dan Profitabilitas; Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia)*. Tesis FE Universitas Diponegoro. [www.eprints.undip.ac.id](http://www.eprints.undip.ac.id).
- Permatasari, Novita Diah. 2009. Pengaruh *Corporate Governance*, Latar Belakang Pendidikan terhadap *Environmental Disclosure*. Skripsi FE. Universitas Sebelas Maret. Tidak dipublikasikan.
- Reeb, David M. dan Wanli Zhao. 2009. *Director Capital and Corporate Disclosure Quality*. Paper.
- Sudarmadji, A.M. dan Lana S. 2007. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Tipe Kepemilikan Perusahaan terhadap Luas *Voluntary Disclosure* Laporan Keuangan Tahunan. *Proceeding PESAT: Gunadarma University*.
- Suhardjanto, Djoko. 2010. *Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan, dan Environmental Disclosure*. Prestasi, 6 (1): 39-69.
- Suhardjanto, Djoko dan Laras Miranti. 2009. Praktik Penerapan Indonesian *Environmental Reporting Index* dan Kaitannya dengan Karakteristik Perusahaan. JAAI, 13 (1): 63-77.
- Suhardjanto, Djoko, Tower, G., dan Brown, A. 2008. *Indonesian Stakeholders'*

- Perceptions on Environmental Information*. Journal of the Asia-Pacific Centre for Environmental Accountability, 14 (4): 2-11.
- Suhardjanto, Djoko, dan Afni, Aulia Nur. 2009. Praktik *Corporate Social Disclosure* di Indonesia. Jurnal Akuntansi/Tahun XIII (3): 265-279.
- Syakhroza, Akhmad. 2005. *Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan Sistem Governance* serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Utama, Sidharta. 2007. Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Vafeas, N. 1999. *Board meeting frequency and firm performance*. Journal of Financial Economics, Vol. 53 (1): 113-42.
- Xiao, J.Z., Yang, H. and Chow, C.W. 2004. *The determinants of voluntary internet-based disclosures by listed Chinese companies*. Journal of Accounting and Public Policy, 23(3): 191-225.
- Xiao, Huafang dan Yuan Jianguo. 2007. *Ownership structure, board composition and corporate voluntary disclosure Evidence from listed companies in China*. Managerial Auditing Journal, 22(6): 604-619.
- Xie, B., Wallace Davidson III, dan Peter Da Dalt. 2001. *Earnings Management and Corporate Governance: The Roles of the Board and the Audit Committee*.
- [www.bumn.go.id](http://www.bumn.go.id)
- [www.csrindonesia.com](http://www.csrindonesia.com)
- [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- <http://bappenas.go.id/index.php?module=FileManager&func=download&pathext=ContentExpress/RKP%202008/Rancangan%20Awal/Buku2/&view=Bab%2020%20-%20Narasi.pdf>. Diakses tanggal 20 Februari 2011.
- <http://entertainment.kompas.com/read/2009/10/16/12050670/50.perusahaan.bumn.berperingkat.hitam>. Diakses tanggal 21 Maret 2011.
- <http://pedulirakyat-online.com/?p=196>. Diakses tanggal 3 Maret 2011.
- <http://situshukum.com/read/news/2011/4914/pusri-dibidik-kasus-dugaan-korupsi>. Diakses tanggal 10 Maret 2011.